

**ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PADA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN) DI INDONESIA**

**ARTIKEL ILMIAH**



**Oleh :**

**NUR AISYAH AYUDIAH**  
**2013310210**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nur Aisyah Ayudiah  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 20 November 1995  
N.I.M : 2013310210  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul : Analisis Penyajian Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

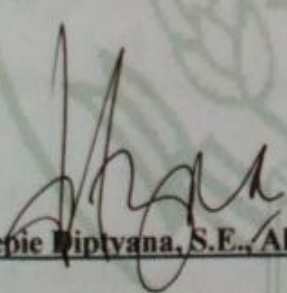
Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,

Tanggal : 20 FEBRUARI 2017

Co. Dosen Pembimbing,

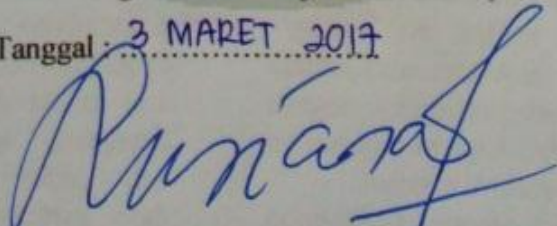
Tanggal : 15 FEBRUARI 2017

  
(Pepie Dipyana, S.E., Ak., M.Si.)

  
(Nur'aini Rokhmania, S.E., Ak., M.Ak.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 3 MARET 2017

  
(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

# ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA

Nur Aisyah Ayudiah  
STIE Perbanas Surabaya  
Email: [2013310210@students.perbanas.ac.id](mailto:2013310210@students.perbanas.ac.id)

Pepie Diptyana  
STIE Perbanas Surabaya  
Email: [pepie@perbanas.ac.id](mailto:pepie@perbanas.ac.id)  
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya

## ABSTRACT

*The rapid development of the internet fairly significantly affect the way companies carry out activities of business reporting and accounting practices. Internet has several characteristics and advantages in the overall disclosure, among others, is the pervasiveness, no boundaries, timely communication, and low cost. Indonesian state-owned companies in the country are required to provide the widest possible public information pursuant to Act No. 14 of 2008, one of the alternatives to present information to the public in an appropriate manner, fast and low cost to the community or the government. The purpose of this study was to describe the presentation of financial information and non-financial state-owned enterprises Non-Listed inter-related with the presentation of Internet Financial Reporting and Legal - Law No. 14 of 2008. This study is an exploratory study using census method. This study used a sample of Non-Listed state-owned companies in Indonesia a number of 75 companies that have been observed as much as two times of observation in the period October to December 2016. The results of this study indicate that there are still many companies that do not make good use of Internet Financial Reporting and have not been able to apply the information non-financial in accordance with the Law well.*

**Keywords:** *Internet Financial Reporting, IFR, BUMN, Voluntary Disclosure*

## PENDAHULUAN

Perkembangan internet yang cukup pesat secara signifikan telah mempengaruhi cara perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pelaporan bisnis dan praktik akuntansi. Internet memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan dalam pengungkapan informasi secara keseluruhan antara lain bersifat *pervasiveness*, tidak mengenal batas, komunikasi tepat waktu, dan berbiaya rendah. Saat ini, internet telah menjadi alat bagi perusahaan sebagai media komunikasi dengan investor tidak

terkecuali BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Yudiastri (2015) menyatakan dalam UU No. 14 Tahun 2008 dijelaskan alasan kebijakan publik dapat memengaruhi hajat hidup orang banyak sebagaimana dalam Pasal 3 (e) UU No. 14 Tahun 2008 bahwa unsur penting dari keterbukaan informasi ini adalah berkaitan dengan kepentingan publik maupun memengaruhi hajat hidup orang banyak.

*Internet Financial Reporting (IFR)* merupakan laporan keuangan perusahaan

publik yang diterbitkan melalui *website* masing-masing perusahaan publik. IFR yang mengatur konten informasi apa saja yang harus disajikan di dalam *website* perusahaan (Almilia, 2009). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pasal 14 telah menyebutkan beberapa informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara harus memuat informasi keuangan dan informasi *Non* keuangan. Informasi keuangan yang harus dimuat dalam *website* perusahaan seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan neraca yang telah diaudit. Informasi *Non* keuangan yang harus terdapat di *website* seperti informasi tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, informasi lembaga pemeringkat kredit/lainnya, informasi penggantian akuntan dan mekanisme tata kelola perusahaan.

BUMN memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada ekonomi nasional setiap tahunnya, potensi BUMN kepada sumbangsih terutama terhadap penerimaan negara dibagi menjadi dua jenis, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berupa dividen, CAPEX, pajak dan dana privatisasi, sedangkan kontribusi tidak langsung berupa belanja modal atau investasi (CAPEX), belanja operasional (opex), kapitalisasi pasar BUMN terbuka dipasar modal, program kemitraan dan bina lingkungan dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Kontribusi BUMN pada penerimaan negara pada tahun 2015 mengalami peningkatan, hal ini diungkapkan dalam laporan kinerja BUMN tahun 2015. Realisasi penerimaan negara tahun 2015 bukanlah dari BUMN yang terdaftar di BEI, melainkan perusahaan BUMN yang tidak terdaftar di pasar modal. Pertamina menjadi perusahaan yang melakukan sumbangsih terbesar atas penerimaan negara seperti halnya pada perusahaan

merupakan salah satu pengungkapan sukarela dikarenakan belum ada regulasi Telkom, PLN, Pupuk Indonesia, PGN, Taspen dan Jasa Raharja. Perusahaan BUMN yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berperan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, seperti halnya melaksanakan penugasan pemerintah melalui mekanisme *Public Service Obligation* (PSO) yaitu penyaluran komoditas bersubsidi yang ditugaskan ke BUMN adalah : (1) BBM tertentu (premium, minyak tanah, solar, dan LPG oleh PT. Pertamina, (2) listrik oleh PT. PLN, (3) pupuk oleh PT. Pupuk Indonesia, (4) beras untuk rakyat miskin oleh Perum Bulog, (5) benih oleh PT. Pertani. Selain itu BUMN juga ditugaskan sebagai penyedia sarana angkutan bersubsidi seperti angkutan penumpang laut kelas ekonomi oleh PT. Pelni, angkutan kereta api kelas ekonomi oleh PT. Kereta Api Indonesia. Dalam hal pemberi jasa layanan publik kementrian BUMN menugaskan Perum LKBN Antara untuk menyediakan berita kepada publik dan PT. Pos Indonesia yang melakukan kewajiban distribusi surat ke seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa BUMN yang non *Listed* juga memberikan peran yang sangat besar bagi penerimaan negara Indonesia dan memiliki potensi yang besar untuk menjalin sinergi. Penelitian ini menarik untuk diteliti dengan tujuan untuk meneliti apakah perusahaan BUMN di Indonesia juga menyampaikan informasi keuangan dan *Non* keuangannya secara *real time* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa informasi publik harus dapat diperoleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Penelitian ini mendeskripsikan

penyajian informasi keuangan dan non keuangan antar BUMN *Non Listed* di Indonesia. Fokus sampel BUMN *Non Listed* dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi bahwa adanya kesenjangan informasi pada BUMN *Non Listed* dan penerapan IFR pada perusahaan BUMN *Non Listed*. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat kategori skor untuk mengukur indeks IFR yang sebelumnya pernah diteliti, penelitian yang sejenis yaitu dilakukan oleh Almilia (2009) dan Botti *et al* (2014) menggunakan empat kategori skor untuk mengukur indeks IFR yang terdiri dari *Content, Timeliness, Technology Used dan User support*.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008**

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi keuangan maupun non keuangan yang telah diatur pemerintah dan menjadi standar bagi perusahaan BUMN yang sebagian besar dikuasai oleh Negara. Dalam pasal 14, telah diatur bahwa informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam Undang-Undang ini adalah :

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
- b. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit ;
- d. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

- e. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan pengawas dan direksi;
- f. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pengawas;
- g. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
- k. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. Kegiatan penugasan pemerintah dan/ atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi
- m. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/ atau
- n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

### **Teori Legitimasi**

Teori legitimasi lebih menekankan agar pemerintah meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat (Sinaga, 2011). Tanggung jawab kepada rakyat akan ditunjukkan oleh pemerintah melalui perusahaan BUMN yaitu dengan menggunakan laporan keuangan tahunan mereka. Sinaga (2011) menyatakan bahwa legitimasi merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan, batasan – batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Legitimasi menganjurkan sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Demikian halnya pada pemerintahan daerah, masyarakat



menjadi semakin kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah khususnya pengelolaan keuangan daerah. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah (Sinaga, 2011).

### **Agency Theory**

Agency Theory merupakan basis teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Kusumawardani (2011) menyatakan bahwa *agency theory* berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Lestari dan Chariri (2007) mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam hubungan dalam teori keagenan, yaitu hubungan antara manajer dengan pemilik (*bonus plan hypothesis*), hubungan antara manajer dengan kreditor (*debt / equity hypothesis*), dan hubungan manajer dengan pemerintah (*political cost hypothesis*).

Teori keagenan menggunakan insentif pihak manajemen untuk menjelaskan pengungkapan sukarela. (Alfaiz, 2013) mengemukakan bahwa pihak manajer mempunyai insentif untuk meningkatkan pengungkapan untuk meyakinkan kepada pemegang saham bahwa mereka dapat bertindak secara optimal. Saat ini internet dapat menyediakan sarana yang ekonomis dan efisien untuk mengkomunikasikan kinerja manajemen kepada *stakeholder* maupun *shareholder*. Dalam teori keagenan ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan sehingga masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Jika pihak-pihak tersebut bertindak untuk kepentingannya sendiri, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik antara prinsipal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah)

### **Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)**

*Voluntary disclosure* atau pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan, dimana perusahaan dapat bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung pengambilan keputusan (Kusumawardani, 2011)

Investor diseluruh dunia menuntut informasi yang lebih detail dan tepat waktu, maka tingkat pengungkapan sukarela semakin meningkat dengan baik di negara-negara dengan pasar yang sudah maju maupun pasar yang masih berkembang.

### **Internet Financial Reporting**

*Internet Financial Reporting* (IFR) adalah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang dapat disajikan dalam *website* masing-masing perusahaan. Pelaporan keuangan melalui internet dapat memudahkan pihak manajemen dan perusahaan dalam menyampaikan informasi tentang perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan.

Menurut Almilia (2009) Indeks yang dapat mengukur *Internet Financial Reporting* (IFR) terdiri dari empat komponen yang terdiri dari:

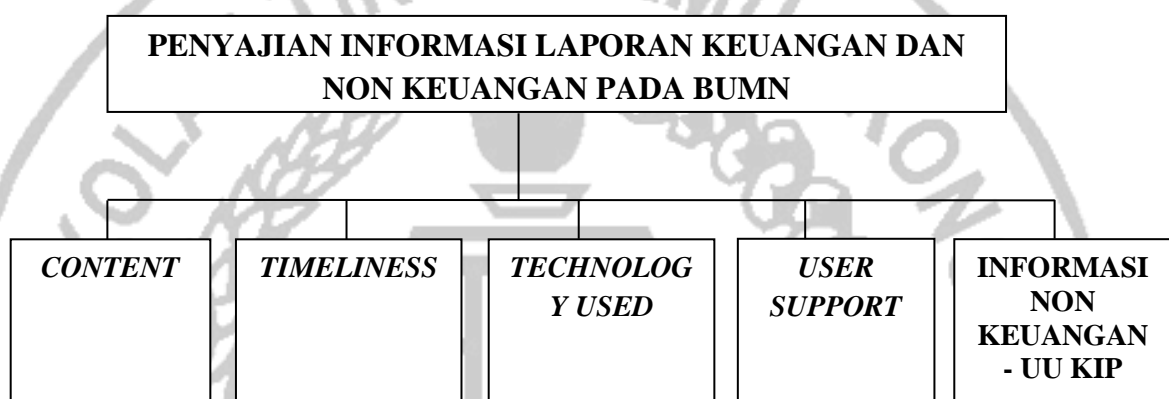
- a. Isi (*content*), meliputi komponen informasi keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan serta laporan berkelanjutan perusahaan. Informasi keuangan yang diungkapkan dalam bentuk HTML memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dalam format PDF, karena informasi dalam bentuk HTML akan memudahkan user dalam mengakses informasi keuangan lebih cepat.
- b. Ketepatanwaktuan (*timeliness*), ketika *website* perusahaan dapat menyajikan

- informasi yang tepat waktu, maka
- c. Pemanfaatan teknologi (*technology used*), komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat disediakan oleh media cetak serta penggunaan media teknologi multimedia, *analysist tools* (contohnya, Excel's Pivot Table), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi "Intellegent Agent" atau XBRL).
  - d. Dukungan pengguna (*user support*), dapat dikatakan indeks *website*

semakin tinggi indeksnya.

perusahaan semakin tinggi jika perusahaan menimplementasikan secara optimal semua sarana dalam *website* perusahaan seperti : *search engine* dan *navigasi/search and navigation tools* (seperti *FAQ links to homepage, site map, site search*).

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: diolah

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

*Content* merupakan informasi keuangan yang terdapat dalam *website* perusahaan BUMN yang terdiri dari laporan posisi keuangan / neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, pengungkapan kinerja kuartalan/semesteran, *financial highlight*, *chairman's report*, opini audit, informasi untuk *stakeholders*, informasi korporasi, laporan tanggungjawab sosial. Kinerja keuangan pada masing-masing perusahaan BUMN tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan biasanya disebabkan oleh potensi masing-masing perusahaan BUMN yang beragam, dengan perbedaan tersebut diyakini bahwa penyajian informasi keuangan akan berbeda pada masing-masing BUMN.

*Timeliness* terdiri dari *Press release*, *Update* berita, pernyataan visi, dan *sustainability report* yang intensitas

penyajianannya diyakini akan berbeda pada masing-masing perusahaan BUMN Non Listed. Hal ini disebabkan karena intensitas penyajian informasi dipengaruhi oleh seberapa aktif perusahaan tersebut dalam beberapa kegiatan dalam kurun waktu satu periode. Penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana perusahaan BUMN Non Listed dapat menyampaikan informasi melalui berita – berita yang akan dimuat dalam *websitenya*.

*Technology used* dan *user support* merupakan komponen yang juga penting untuk keteraksesan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* perusahaan BUMN Non Listed, peran dari kedua komponen ini sangat dibutuhkan ketika pengunjung memiliki kemampuan komputasi diatas rata-rata. Sehingga dengan penerapan *technology used and*

*user support* yang baik, dapat memudahkan pengunjung dalam mengakses setiap informasi pada situs *website* perusahaan BUMN Non Listed.

Undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 merupakan peraturan yang disusun oleh pemerintah untuk menjelaskan informasi apa saja yang harus diungkapkan kepada publik oleh perusahaan BUMN, informasi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah informasi selain informasi keuangan yang disajikan oleh BUMN. Penyajian informasi non keuangan yang tersaji dalam masing-masing *website* perusahaan diyakini memiliki penyajian yang berbeda khususnya dalam hal penerapan yang akan disajikan pada situs *website* BUMN Non Listed. Maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana penyajian informasi non keuangan berdasarkan UU-KIP yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang tidak menguji signifikansi antar variabel, tujuan dari penelitian ini hanyalah mendeskripsikan serta memberikan gambaran bagaimana penerapan IFR pada perusahaan BUMN Non Listed di Indonesia dengan mengelompokkan indeks IFR yang terdiri dari empat indeks yaitu *Content*, *Timeliness*, *Technology Used*, *User support* dan bagaimana penerapan informasi non keuangan berdasarkan peraturan UU-KIP no 14 tahun 2008. Dalam metode deskriptif ini, peneliti mengukr gejala-gejala yang ada tanpa menyelidiki mengapa gejala tersebut ada, sehingga tidak perlu mempertimbangkan hubungan antar variabel karena hanya menggunakan data yang dimiliki untuk suatu pemecahan masalah dan tidak menguji hipotesis.

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan penyajian informasi keuangan dan informasi non keuangan antar perusahaan BUMN Non Listed di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dalam metode ini penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya (Hartono, 2015: 143).

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder merupakan sumber data penelitian yang dapat diperoleh melalui perantara dengan media tidak langsung. Jika dilihat dari jenis data, penelitian ini termasuk penelitian arsip. Penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

### Identifikasi Variabel

Penelitian ini membatasi sampel yang akan digunakan yaitu perusahaan BUMN Non Listed di Indonesia berdasarkan laporan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta data dari situs *website* resmi BUMN.

Penelitian ini tidak menggunakan variabel karena penelitian ini hanya membandingkan serta mendeskripsikan penyajian informasi keuangan dan non keuangan antar *website* perusahaan BUMN Non Listed. Untuk mendeskripsikan penyajian informasi keuangan dan non keuangan antar *website* perusahaan BUMN Non Listed maka peneliti menggunakan indeks-indeks IFR sebagai tolok ukur ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan dan non keuangan. Indeks-indeks tersebut adalah *Content*, *Timeliness*, *Technology Used*, dan *User support*.



Sebagai dasar penyajian informasi non keuangan pada perusahaan BUMN Non Listed maka peneliti akan menggunakan acuan peraturan UU-KIP No 14

Tahun 2008 sebagai dasar pengungkapan informasi pada BUMN Non Listed.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### Internet Financial Reporting

Pengukuran variabel IFR dalam penelitian ini menggunakan skor dan indeks. Skor dapat diperoleh berdasarkan checklist dari masing-masing penilaian indeks IFR.

Pengukuran indeks IFR diukur dengan indeks yang dikembangkan oleh Almilia (2008) sebagai berikut:

#### a. Content

Konten merupakan komponen informasi laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdiri dari 16 item. Dengan bobot penilaian, 1 = ada, 0 = tidak ada. Apabila menggunakan PDF =1, HTML=2, Chart =3. **Total skor maksimum untuk indeks content adalah 33 poin.** Untuk mencari rata – rata penyajian content pada perusahaan BUMN Non Listed dapat menggunakan rumus :

**Indeks Content =**

$$\frac{\text{Total Skor Content}}{\text{Skor Maksimum Content}} \times 100\%$$

#### b. Indeks Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan (Timeliness)

*Timeliness* merupakan ketepatan waktu penyajian informasi di *website* resmi Perusahaan BUMN. Informasi tersebut adalah informasi yang disampaikan kepada publik mengenai berita-berita yang telah dipublikasikan perusahaan BUMN pada *website* resminya yang terdiri atas 7 item. **Total skor maksimum dari indeks timeliness adalah 10 poin.** Untuk mencari rata – rata penyajian *timeliness* pada perusahaan

BUMN Non Listed dapat menggunakan rumus :

### Indeks Timeliness

$$\frac{\text{Total Skor Timeliness}}{\text{Skor Maksimum Timeliness}} \times 100\%$$

#### c. Indeks Technology Used

Indeks *Technology Used* yang digunakan terdiri dari 6 item. **Total skor maksimum untuk indeks Technology Used adalah 6 poin.** Untuk mencari rata – rata penyajian *technology used* pada perusahaan BUMN Non Listed dapat menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Skor Tech Used}}{\text{Skor Maksimum Tech Used}} \times 100\%$$

#### d. Indeks User support

*User support* merupakan akses pendukung yang terdapat di dalam situs *website* resmi perusahaan BUMN yang dapat memudahkan para pengunjung *website* tersebut dalam berselancar. Indeks fasilitas pendukung web (*user support*) terdiri dari 7 item. **Total skor maksimum untuk indeks user support adalah 11 poin.** Untuk mencari rata – rata penyajian *user support* pada perusahaan BUMN Non Listed dapat menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Skor User Support}}{\text{Skor Maksimum User Support}} \times 100\%$$

*Internet Financial Reporting* (IFR) berdasarkan Almilia (2009) dimodifikasi dan disesuaikan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyesuaian terletak pada *Stock Quote* dan *Forward Looking Statement*. Pada perusahaan BUMN yang *Non Listed*, *stock quote* diganti dengan rencana capaian anggaran tahun berjalan dan pernyataan manajemen atas rencana kerja berikutnya. Untuk *Forward Looking Statement* diganti dengan *sustainability report* atau laporan kinerja perusahaan. Setelah melalui tahapan *check list*, untuk selanjutnya indeks dapat diukur dengan menggunakan

rumus matematis yang dapat dihitung dengan cara :

### Indeks IFR

$$= \frac{\text{Total Skor Masing-Masing}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Nilai skor IFR maksimum dari instrumen indeks ini adalah 60 untuk perusahaan yang *Non Listed*.

### Informasi Non Keuangan UU-KIP

Informasi Non Keuangan yang wajib disediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digunakan dalam check list yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14 terdiri dari 22 item informasi, dan akan disurvei pada beberapa *website* perusahaan Badan Usaha Milik Negara, kemudian akan dilakukan check list keberadaan informasi Non Keuangan pada masing-masing *website* perusahaan. Dengan bobot penilaian, 1 = Ada atau 0 = Tidak ada. Bobot apabila menggunakan PDF=1, HTML=2, **sehingga dapat diperoleh total skor maksimum dari informasi Non keuangan yaitu 44 poin.** Dapat dihitung dengan rumus :

### Indeks Inf. Non Keuangan

$$= \frac{\text{Total Skor Yang Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN *Non Listed* sesuai dengan data yang diambil pada situs *website* resmi Kementerian BUMN. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sensus. Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data

sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ada dan diperoleh dari IHPS dan berbagai situs web resmi BUMN. Pengumpulan data ini merupakan teknik dokumentasi yaitu dengancara menelusuri situs *website* resmi perusahaan BUMN di Indonesia dengan menggunakan *check list*.

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini pada statistik deskriptif akan memuat hal – hal sebagai berikut :

1. Menyajikan indeks IFR dan indeks informasi non keuangan perusahaan BUMN *Non Listed* secara berurutan dari nilai tertinggi hingga terendah untuk mendeskripsikan nilai maksimum dan minimum serta menyajikan ranking indeks IFR dan indeks informasi non keuangan perusahaan BUMN *Non Listed*.
2. Menghitung nilai *mean* dan modus.
3. Mendeskripsikan penyajian *content*, *timeliness*, *technology used* dan *user support perusahaan* BUMN *Non Listed* serta mendeskripsikan penyajian informasi non keuangan berdasarkan UU-KIP.

#### Analisis Cluster

Analisis cluster adalah teknik statistik yang berguna untuk mengelompokkan objek ataupun variabel yang terbentuk memiliki sifat dan karakteristik yang berdekatan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode hirarkis (average linkage) dengan teknik anglomerative dan ukuran jarak euclidean. Menurut Mediosa (2014), hierarki cluster digunakan untuk analisis data dengan sampel yang kecil. Langkah – langkah pengelompokkan dalam analisis klaster dengan metode hierarki mencakup tiga hal, yaitu :

1. Mengukur kesamaan jarak, hal yang penting dalam pengelompokkan adalah bagaimana mengkuantifikasi ukuran kemiripan antar objek.
2. Membentuk cluster secara hierarkis. Dalam metode ini akan menggunakan anglomerasi. Dalam metode anglomerasi tiap observasi pada mulanya dianggap sebagai cluster tersendiri sehingga terdapat cluster sebanyak jumlah observasi. Kemudian dua cluster yang terdekat kesamaannya digabung menjadi suatu cluster baru, sehingga jumlah cluster berkurang satu pada tiap tahap.
3. Melakukan interpretasi terhadap klaster yang terbentuk.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif secara keseluruhan:

1. Menyajikan skor dan indeks IFR serta skor informasi non keuangan perusahaan BUMN Non Listed

Berdasarkan pengamatan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Brantas Abipraya, dan PT Reasuransi Umum Indonesia memiliki skor IFR sebesar 39 poin dan nilai indeks IFR sebesar 65 persen, artinya adalah diantara perusahaan BUMN Non Listed yang lain, ketiga perusahaan tersebut telah memanfaatkan IFR paling baik karena memiliki skor dan indeks IFR paling tinggi, sedangkan PT. Sang Hyang Seri mempunyai skor IFR dan indeks IFR yang paling rendah.

2. Menyajikan indeks informasi non keuangan

PT. Asuransi Jasa Indonesia memperoleh skor sebesar 29 poin atau 66 persen yang artinya hanya terdapat 15 poin atau 2 item dalam *check list* yang tidak diungkapkan dalam *website* perusahaannya yaitu item kasus hukum berdasarkan UU-KIP dan item informasi perubahan tahun fiskal

perusahaan tidak terjadi saat pengamatan. Indeks yang diperoleh PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan skor maksimum pada informasi non keuangan perusahaan BUMN Non Listed. Namun, PT. Sang Hyang Seri, PT. Industri Sandang Nusantara, dan PT. Pindad memiliki skor informasi non keuangan yang sangat rendah yaitu 8 poin atau 18 persen yang artinya 69 persen item yang harusnya disajikan sesuai dengan Undang – Undang No 14 Tahun 2008 tidak disajikan dengan baik oleh ketiga perusahaan tersebut. PT. Sang Hyang Seri dan PT. Industri Sandang Nusantara hanya memberikan 4 item informasi pada situs *websitenya* yaitu nama perusahaan, tempat atau alamat perusahaan, jenis kegiatan usaha, dan tanggal pendirian dan/atau jangka waktu sedangkan PT. Boma Bisma Indra hanya menyediakan 4 item informasi.

3. Menghitung nilai mean dan modus

**Tabel 1.2**

### *Descriptive Statistics IFR BUMN Non Listed*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Modus
INDEKS IFR	75	8,33%	65%	43,69%	58%
Valid N (listwise)	75				

### Sumber : Lampiran

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata Internet Financial Reporting pada perusahaan BUMN yang tidak terdaftar pada BEI adalah sebesar 43,69 persen dengan sampel penelitian sebanyak 75 perusahaan. Terdapat 42 perusahaan BUMN non Listed yang memiliki nilai Internet Financial Reporting diatas rata – rata. Jika dinyatakan dalam prosentase, perusahaan BUMN non Listed yang memiliki nilai Internet Financial Reporting diatas rata – rata adalah sebanyak 56 persen dari total sampel yang ada. Sedangkan perusahaan BUMN non Listed yang nilai Internet Financial Reporting dibawah rata-rata adalah sebanyak 33

perusahaan. Jika dinyatakan dalam prosentase jumlah perusahaan BUMN non *Listed* yang memiliki nilai Internet Financial Reporting dibawah rata – rata adalah sebanyak 44 persen dari total sampel yang ada. Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa indeks IFR yang paling sering muncul adalah 58,33 persen, terdapat 8 perusahaan yang memiliki skor 58,33 persen dari total 75 sampel perusahaan BUMN yang ada.

#### 4. Menghitung nilai mean dan modus prosentase indeks informasi non keuangan

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai rata – rata prosentase indeks informasi non keuangan pada perusahaan BUMN Non *Listed* sebesar 47 persen dengan sampel sebanyak 75 perusahaan BUMN Non *Listed*. Terdapat 44 perusahaan BUMN non *Listed* yang memiliki nilai prosentase indeks informasi non keuangan diatas rata – rata. Jika dinyatakan dalam prosentase, perusahaan BUMN non *Listed* yang memiliki nilai skor informasi non keuangan diatas rata – rata adalah sebanyak 59 persen dari total sampel yang ada. Sedangkan perusahaan BUMN non *Listed* yang memiliki nilai nilai prosentase indeks informasi non keuangan dibawah rata – rata sebanyak 31 perusahaan.

**Tabel 1.3**

#### ***Descriptive Statistics Informasi Non Keuangan BUMN Non Listed***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Modus
SKOR	75	16%	66%	47%	57%
Valid N (listwise)	75				

#### **Sumber : Lampiran**

Nilai modus terletak pada indeks yang bernilai 57 persen yang artinya bahwa berdasarkan hasil pengamatan, ternyata terdapat skor yang sama pada 12 perusahaan BUMN Non *Listed*.

#### 5. Indeks *Content/Isi*

Selama pengamatan dari 75 *website* perusahaan BUMN Non *Listed*, komponen *content/isi* laporan keuangan tahun 2015 yang disajikan pada *website* cukup beragam. Konten yang paling banyak diunggah atau disajikan oleh perusahaan dalam bentuk PDF adalah laporan perubahan ekuitas (57 persen dari total sampel atau 43 *website* BUMN Non *Listed*) dan informasi perusahaan (57 persen dari total sampel atau 43 *website* BUMN Non *Listed*), penyajian dalam bentuk HTML paling banyak adalah konten laporan laba rugi (15 persen dari total sampel atau 11 *website* BUMN Non *Listed*) dan informasi perusahaan (23 persen dari total sampel atau 17 *website* BUMN Non *Listed*). Sedangkan konten yang paling sedikit diunggah atau disajikan oleh perusahaan dalam bentuk PDF adalah laporan pengungkapan kinerja keuangan kuartalan / semester (1 persen dari total sampel atau hanya 1 perusahaan) yang disajikan oleh PT. PLN yaitu tersaji laporan keuangan kuartalan tahun 2010 sampai laporan keuangan triwulanan II tahun 2016, terdapat juga laporan pengungkapan kinerja kuartalan / semester dalam bentuk HTML (1 persen dari total sampel atau 1 *website* BUMN Non *Listed*) yang diunggah oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja yaitu laporan keuangan triwulan I tahun 2014, laporan keuangan triwulan II tahun 2014, laporan keuangan triwulan III tahun 2014, dan laporan keuangan triwulan IV tahun 2014.

Jumlah perusahaan yang menyajikan laporan tahunan / kuartal yang tersedia selain tahun terakhir pada poin 1 sebanyak 43 perusahaan atau apabila diprosentasikan sebesar 57 persen dari total sampel yang ada. Sebesar 1 persen atau 1 *website* perusahaan tersebut telah menyediakan informasi laporan tahunan / kuartal lampau yang disajikan dalam bentuk HTML, sedangkan sebanyak 74 perusahaan atau 99 persen tidak menyajikan informasi laporan tahunan / kuartal lampau yang disajikan dalam

bentuk HTML. Perusahaan tersebut adalah PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Perusahaan BUMN yang tidak terdaftar pada BEI memiliki total sampel 75 perusahaan, sebesar 56 persen atau 42 *website* perusahaan telah menggunakan bahasa Inggris sebagai alternatif pengunjung warga negara asing ketika mengakses informasi pada *website* perusahaan, sedangkan sisanya sebanyak 3 persen atau 2 *website* perusahaan yaitu PT. Len Industri dan PT. Pelabuhan Indonesia II menggunakan alternatif lain yaitu bahasa Cina pada situs *websitenya*.

#### 6. Indeks *Timeliness*

item penilaian pada indeks *timeliness* yang memiliki nilai indeks paling tinggi adalah *unaudited latest quarterly result* yakni tidak ada satupun perusahaan BUMN yang menyajikan laporan kuartalan belum diaudit pada situs *websitenya*. Item indeks *timeliness* yang paling tersedia pada *website* perusahaan BUMN Non Listed adalah chart of future profit atay target masa depan perusahaan yang disajikan oleh 69 perusahaan atau sekitar 92 persen dari total sampel yang ada. Nilai indeks *timeliness* tertinggi yang didapat oleh perusahaan BUMN Non Listed adalah 100 persen yaitu berarti bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan dengan baik tingkat ketepatan waktu yang diamati berdasarkan item penilaian yakni PT. Len Industri, PT. Pegadaian, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT Pelabuhan Indonesia IV, PT. Pelabuhan Indonesia I, dan PT. Perikanan Nusantara. Indeks tertinggi didominasi oleh sektor transportasi dan perdagangan, ini berarti bahwa sektor transportasi khususnya PT. Pelabuhan Indonesia mampu untuk menerapkan *timeliness* dengan baik yang berguna bagi pengguna atau *user* yang ingin mengakses informasi pada *website*. indeks *timeliness* terendah yang didapat perusahaan BUMN Non Listed adalah 0 persen atau sama sekali tidak menyediakan informasi yang

berhubungan dengan indeks *timeliness* yakni PT. Industri Sandang Nusantara.

#### 7. Indeks *Technology Used*

Berdasarkan pengamatan, komposisi perusahaan BUMN Non Listed yang memanfaatkan indeks *technology used*, dari keenam item indeks *technology used* memiliki hasil yang beragam terutama XBRL, hanya dua perusahaan yang menerapkan XBRL pada situs *websitenya*. Item yang paling banyak ditampilkan oleh indeks ini adalah presentation slide, online feedback, download plug-in spot, dan multimedia. Sedangkan item indeks *technology used* yang paling sedikit ditampilkan adalah analysis tools dan XBRL.

#### 8. Indeks *User Support*

Dari kelima item penilaian indeks *user support*, yaitu *help and FAQ*, *link to homepage*, *link to top*, *site map* dan *site search*, item yang paling banyak tersedia pada *website* BUMN Non Listed adalah *Link to Homepage* dan *Site Search*. *Link to Homepage* disediakan oleh 72 perusahaan atau 96 persen dari total sampel yang ada, dimana *link to homepage* akan memudahkan pengguna atau *user website* ketika mengakses informasi pada *website* ketika ingin berada pada beranda *website* (home)., nilai indeks *user support* tertinggi sebesar 100 persen yaitu PT. Reasuransi Umum Indonesia. Sedangkan untuk indeks *user support* terendah sebesar 0 persen yaitu PT. Sang Hyang Seri.

#### 9. Informasi Non Keuangan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah telah mengeluarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang informasi keuangan dan non keuangan



yang menjadi standar bagi perusahaan BUMN dalam menyajikan informasi yang berhubungan dengan perusahaannya kepada masyarakat umum, tidak terkecuali bagi pemerintah. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan dengan melakukan *check list* berupa item – item informasi non keuangan yang wajib disediakan oleh Perusahaan BUMN yang terdiri dari 31 item. Item informasi non keuangan yang paling banyak diungkapkan adalah nama perusahaan, tempat kedudukan atau alamat perusahaan, nama anggota direksi, nama anggota dewan komisaris, informasi mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan jenis kegiatan usaha. Sedangkan item informasi non keuangan yang paling sedikit ditampilkan adalah kasus hukum berdasarkan UU-KIP, hasil penilaian lembaga pemeringkat lainnya, dan informasi perubahan tahun fiskal perusahaan.

### Hasil Analisis Cluster



Sumber : Data Diolah

Gambar 1.2

### Dendrogram Analisis Cluster Indeks IFR Hierarki

Pada gambar 1.2 dendrogram menghasilkan empat kelompok klaster dalam analisisnya, akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelompok 1 terdiri dari PT. Pertani, PT. Yodya Karya, PT. Industri Kapal Indonesia, PT. INKA, PT. Amarta Karya, PT. Energy Managemet Indonesia, PT. Dok da Perkapalan Koja Bahari, PT. Industri Nuklir Indonesia, PT. Balai Pustaka, PT. Perikanan

Nusantara, PT. PT. Balai Pustaka, PT. Perikanan Nusantara, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Garam, dan PT. Inalum, PT. Permodalan Nasional Madani, PT. Pindad, PT. Berdikari, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Istaka Karya, PT. Boma Bisma Indra, PT. Kawasan Industri Makassar, PT. PAL Indonesia, PT. Industri Sandang Nusantara, PT. Virama Karya, PT. Djakarta Llyod, PT. Kertas Kraft Aceh, PT. Survai Udara Penas, PT. Bina Karya, PT. Hotel Indonesian Natour, dan PT. Varuna Tirta Prakasya.

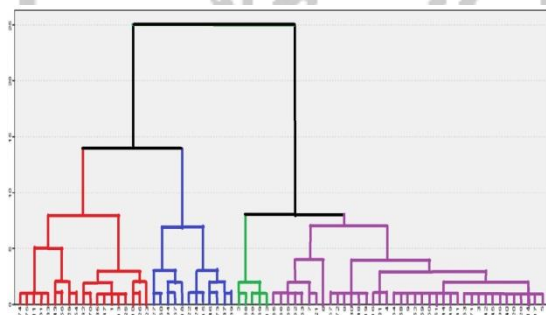
2. Kelompok 2 terdiri dari PT. Sang Hyang Seri.
3. Kelompok 3 terdiri dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Indra Karya, PT. Barata Indonesia, PT. PANN Multi Finance, PT. Danareksa dan PT. Kawasan Berikat Nusantara.
4. Kelompok 4 terdiri dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Sucofindo, PT. Bhanda Ghara Reksha, PT. Pelayaran Nasional Indonesia, PT. Perusahaan Pengelola Aset Negara, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Kliring Berjangka Indonesia, PT. Angkasa Pura I, PT. Perkebunan Nusantara III, PT. Pos Indonesia, PT. Asuransi ABRI, PT. Indonesia Tourism Development Corporation, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma, PT. Hutama Karya, PT. Pertamina, PT. Surveyor Indonesia, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Kawasan Industri Medan, PT. Pupuk Indonesia Holding Company, PT. TASPEN, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Dahana, PT. Pegadaian, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Len Industri, PT. Pelabuhan Indonesia IV, PT. Reasuransi Umum Indonesia, PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT. Brantas Abipraya, PT. Reasurasi Indonesia Utama (Persero), PT. Sarinah, PT. Asuransi Kredit Indonesia, PT. INTI, PT. Pelabuhan Indonesia III, PT. PLN, PT. Angkasa



Pura II, PT. Bio Farm, dan PT. Peabuan Indonesia I.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengelompokan kelima klaster berdasarkan sampel dan skor IFR digolongkan menjadi empat kategori yaitu:

1. Kategori IFR sangat tinggi dimiliki oleh kelompok 5 sejumlah 39 anggota dengan indeks IFR antara 53% - 65%.
2. Kategori IFR tinggi dimiliki oleh kelompok 4 sejumlah 6 anggota dengan indeks IFR antara 43% - 50%.
3. Kategori IFR rendah dimiliki oleh kelompok 1 sejumlah 29 anggota dengan indeks IFR antara 12% - 38%.
4. Kategori IFR sangat rendah dimiliki oleh kelompok 3 dengan satu anggota yaitu PT. Sang Hyang Seri dengan indeks IFR sejumlah 3%.



**Sumber : Data Diolah**

**Gambar 1.3**

**Dendrogram Analisis Cluster Informasi  
Non Keuangan UU-KIP Metode  
*Average Linkage***

Pada gambar 1.3 dendrogram menghasilkan empat kelompok klaster dalam analisisnya, akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelompok 1 terdiri dari PT. Virama Karya, PT. Yodya Karya, PT. Balai Pustaka, PT. Indra Karya, PT. Industri Nuklir Indonesia, PT. Kertas Kraft

Aceh, PT. Permodalan Nasional Madani, PT. Inalum, PT. Perikanan Nusantara, PT. Industri Kapal Indonesia, PT. Survei Udara Penas, PT. INKA, PT. PANN Multi Finance, PT. Amarta Karya, PT. Berdikari, PT. Energy Management Indonesia, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Garam, dan PT. Djakarta Llyod.

2. Kelompok 2 terdiri dari PT. Hotel Indonesia Natour, PT. Pindad, PT. Industri Sandang Nusantara, PT. Sang Hyang Seri, PT. Boma Bisma Indra, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari, PT. Bina Karya, PT. PAL Indonesia, PT. Varuna Tirta Prakasya, PT. Istaka Karya, dan PT. Kawasan Industri Makassar.

3. Kelompok 3 terdiri dari PT. Angkasa Pura I, PT. Pertani, PT. Kawasan Berikat Nusantara, PT. Sucofindo, dan PT. Barata Indonesia.

4. Kelompok 4 terdiri dari PT. Reasuransi Umum Indonesia, PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III, PT. Pos Indonesia, PT. Pupuk Indonesia Holding Company, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Danareksa, PT. Asuransi Jasa Indonesia, PT. Pertamina, PT. TASPEN, PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT. Indonesia Tourism Development Corporation, PT. Pegadaian, PT. Brantas Abipraya, PT. Bio Farma, PT. PLN, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Sarinah, PT. Asuransi Kredit Indonesia, PT. Pelabuhan Indonesia IV, PT. Perusahaan Pengelola Aset, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Pelabuhan Indonesia III, PT. Kliring Berjangka Indonesia, PT. Pelabuhan Indonesia I, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma, PT. Pelayaran Nasional Indonesia, PT. Surveyor Indonesia, PT. Angkasa Pura II, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Len Industri, PT. INTI, PT. Kawasan Industri Medan, PT. Dahana, PT. Utama Karya, PT. Bhanda Ghara Reksa,

PT. Biro Klasifikasi Indonesia, dan PT. Asuransi ABRI.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengelompokan kelima klaster berdasarkan sampel dan skor informasi non keuangan berdasarkan UU-KIP digolongkan menjadi 4 kategori yaitu :

1. Kategori penyajian informasi non keuangan berdasarkan UU-KIP sangat tinggi dimiliki oleh kelompok 4 sejumlah 39 anggota dengan indeks antara 55% - 66%.
2. Kategori penyajian informasi non keuangan berdasarkan UU-KIP tinggi dimiliki oleh kelompok 3 sejumlah 5 anggota dengan indeks antara 50% - 52% dari PT. Angkasa Pura I, PT. Pertani, PT. Kawasan Berikat Nusantara, PT. Sucofindo, dan PT. Barata Indonesia.
3. Kategori penyajian informasi non keuangan berdasarkan UU-KIP rendah dimiliki oleh kelompok 1 sejumlah 19 anggota dengan indeks antara 30% - 45%.
4. Kategori penyajian informasi non keuangan berdasarkan UU-KIP sangat rendah dimiliki oleh kelompok 2 sejumlah 12 anggota dengan indeks antara 16% - 27%.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyajian informasi keuangan dan non keuangan antar perusahaan BUMN Non *Listed* terkait dengan penyajian *Internet Financial Reporting* dan penerapan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan 75 sampel perusahaan BUMN yang tidak terdaftar di Bursa Efek

Indonesia yang telah diamati sebanyak 2 kali pengamatan dalam periode waktu 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai bulan Desember 2016. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perolehan 5 ranking tertinggi perusahaan BUMN Non listed berdasarkan perolehan indeks IFR diperoleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai ranking 1 dengan indeks IFR sebesar 65 persen PT. Brantas Abipraya sebagai ranking 2 dengan indeks IFR sebesar 65 persen. PT. Reasuransi Umum Indonesia sebagai ranking 3 dengan indeks IFR sebesar 65 persen, PT. Angkasa Pura II sebagai ranking 4 dengan indeks IFR sebesar 63 persen, dan PT. Bio Farma sebagai ranking 5 dengan indeks IFR sebesar 63 persen. Perolehan ranking tertinggi diperoleh pada sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan, dari sini dapat dilihat bahwa jenis sektor perusahaan juga dapat memengaruhi bagaimana perusahaan tersebut melakukan keterbukaan informasi perusahaannya kepada publik maupun pemerintah.

2. Hasil perolehan 5 ranking terendah perusahaan BUMN Non *Listed* berdasarkan informasi non keuangan diperoleh PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai ranking 1 dengan perolehan indeks Informasi Non Keuangan UU-KIP sebesar 68%, PT. Asuransi Jiwasraya sebagai ranking 2 dengan perolehan indeks Informasi Non Keuangan UU-KIP sebesar 66%, PT. Danareksa sebagai ranking 3 dengan perolehan indeks Informasi Non Keuangan UU-KIP 64%, PT. Perkebunan Nusantara III sebagai ranking 4 dengan perolehan indeks Informasi Non Keuangan UU-KIP 64%, dan PT. Pos Indonesia sebagai ranking 5 dengan perolehan indeks Informasi Non Keuangan UU-KIP 64%.

3. Penyajian konten pada *website* perusahaan BUMN non *Listed* mengenai informasi penyajian keuangan perusahaan telah dapat diterapkan dengan baik, mayoritas penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, CALK, pengungkapan kinerja keuangan kuartalan, opini audit, informasi untuk *stakeholders*, informasi korporasi dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan masih disajikan dalam bentuk PDF dan hanya beberapa perusahaan yang sudah menyajikan dalam bentuk HTML sehingga aksesnya lebih mudah dan cepat.

4. Penerapan *timeliness* pada *website* perusahaan BUMN non *Listed* ditemukan hasil bahwa rata – rata perusahaan BUMN memiliki *Press release* dengan prosentase 87% dari total 75 perusahaan, artinya hanya sebanyak 13 persen perusahaan yang tidak memanfaatkan *Press release* pada situs *websitenya*. Akan tetapi, untuk *Update* berita masih cenderung kurang *Update* karena sejak tanggal pengamatan ditemukan berita yang mempunyai waktu lebih dari 1 minggu. Hal yang menarik adalah sejumlah 44 perusahaan BUMN non *Listed* telah menyajikan sustainability report pada situs *websitenya*.

5. Pemanfaatan *tecnology used* pada *website* perusahaan BUMN non *Listed* yang diukur berdasarkan 6 item memiliki temuan bahwa teknologi yang digunakan sudah sangat baik hal ini dapat dilihat karena terdapat banyak perusahaan yang memanfaatkan presentation slides dengan beragam bentuk, terdapat 2 perusahaan yaitu PT. INTI dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia telah menggunakan teknologi XBRL.

6. *User support* pada *website* perusahaan BUMN non *Listed* dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh user atau pengunjung *website*, artinya pengunjung *website* dapat mengakses

segala informasi tentang perusahaan baik informasi umum maupun tentang informasi kinerja atau keuangan perusahaan dengan mudah, hal yang menarik adalah terdapat 13 perusahaan BUMN non *Listed* yang menyajikan informasi keuangan pada beranda (home) *website* perusahaan sehingga pengunjung hanya cukup melakukan 1 kali klik saja. Temuan lain dari penerapan *user support* adalah terdapat 1 perusahaan yaitu PT. Pos Indonesia yang tidak konsisten mengenai desain *website* selama 2 sampai 3 kali pengamatan.

7. Penyajian informasi non keuangan UU-KIP pada masing-masing *website* perusahaan memiliki keberagaman hasil. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan 22 item penilaian, terdapat 2 perusahaan yang hampir dapat menerapkan secara keseluruhan Undang – Undang tersebut yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia dan PT. Pos Indonesia. Sedangkan perusahaan yang masih belum dapat menyajikan informasi non keuangan dengan lengkap pada situs *websitenya* terdapat 3 perusahaan dengan skor 4 atau hanya 13 persen yaitu PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Sandang Nusantara dan PT. Sang Hyang Seri.

8. Perusahaan yang dikelola dengan baik mempunyai ciri – ciri diantaranya dapat menyampaikan informasi dengan lebih cepat, akurat, dan lengkap. Dimana praktik Internet Financial Reporting merupakan salah satu bentuk menyajikan informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan dengan masalah keuangan dan pengelolaan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah khususnya.

9. Berdasarkan analisis cluster, kelompok kluster yang paling ideal untuk pengelompokkan indeks IFR dan indeks informasi non keuangan adalah 4 kluster

yang terdiri dari sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki situs *website* dan situs dalam underconstruction (perbaikan) untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, hal ini membuat sampel peneliti semakin berkurang.

### Saran

Pada penelitian selanjutnya diharapkan :

1. Menggunakan sampel keseluruhan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.
2. Pada analisis cluster dapat menggunakan metode yang berbeda untuk mengelompokkan data menjadi beberapa klaster.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alfaiz, D. R. (2013). Pengaruh Karakteristik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan NonKeuangan Melalui *Website* Perusahaan Indonesia. *Universitas Diponegoro*, 52-70, 4(1).
- Allporta, Christopher D., And John A. 2010. "The Impact Of *Website* Design On The Perceived Credibility Of *Internet Financial Reporting*". *Intell. Sys. Acc. Fin. Mgmt.* 17, 127-141
- Almilia, L. S. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela "*Internet Financial Reporting and Sustainability Reporting*". *JAAI. Vol 12. No.2*, 117-131.
- Almilia, L. S. (2009). Analisa Kualitas Isi FINANCIAL AND SUSTAINABILITY REPORTING Pada *Website* Perusahaan Go Publik Di Indonesia. *Semnast Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009)*.
- Anggarwal, Priyanka. 2013. "Impact Of Sustainability Performance On Its Financial Performance A Study Of Listed Indian Companies". *Global Journal Of Management And Business Research Finance*, Vol 13, Issue 11.
- Budisusetyo, S., & Almilia, L. S. (2013). Mencari Model Pelaporan Informasi Keuangan Perusahaan Berbasis Web. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, 1(1), 17-41.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2012). *Multivariate Data Analysis : A Global Perspective*. New Jersey: Pearson.
- Hartono, J. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Imam Ghazali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi keenam*. Semarang. BP Undip.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Ketua BAPEPAM No. Keputusan 431/LK/2012 tentang Situs *Website* Emiten dan Perusahaan Publik.
- Khikmawati, Insani & Linda Agustina. 2015. "Analisis Rasio Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Melalui Internet Pada *Website* Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*. Vol 4 (1).

- Kusumawardani, Arum. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (*Internet Financial Reporting*) Dalam Website Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*. Vol 5 (1). [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) (diakses tanggal 20 Agustus 2016)
- Medriosa, Hamdeni. 2014. "*Metode Cluster Analysis*". *Jurnal Momentum*. Vol 16 (2). [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id) (diakses tanggal 17 September 2016)
- Siregar, S. (2014). *Metode Penelitian KUANTITATIF*. Jakarta: KENCANA.
- Suwardjono. 2008. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *SNA 17 Mataram, Lombok*, 80-90.
- \_\_\_\_\_, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Wati, D. S. (2012). Evaluasi Keterbukaan Informasi Keuangan Pada Website Kementrian dan Lembaga Tinggi Negara Indonesia. *Gunadarma University Journal*.
- Yudiastri, N. P. (2015). Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perseroan Terbatas Non BUMN dan BUMD Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Universitas Udayana Journal*, 80-87.
- Yulianto, Safa'at. 2014. "*Analisis Klaster Untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat*". *Statistika*, Vol. 2, No. 1.

